



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Dewan Bakal Panggil Jakpro dan Sarana Jaya

### Soal Ongkos Sewa Utilitas Selangit

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyatakan segera memanggil PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Hal itu terkait kisruh harga sewa Pembuatan Ducting Terpadu Utilitas (PDTU) di ibu kota yang sangat tinggi. Terlebih, membuat masyarakat dan pengusaha yang bergerak di sektor jaringan utilitas serta pelayanan publik resah.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, akibat gaduh dan membuat masyarakat resah, pihaknya wajib angkat bicara mengenai kisruh tarif dan sewa Pembuatan Ducting Terpadu Utilitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakpro.

Terlebih, BUMD milik Pemprov DKI ini dilaporkan menawarkan harga sewa spektakuler. Untuk sewa kabel yang ditawarkan JakPro sebesar Rp 70 ribu per meter per tahun per ruas jalan di Jakarta.

Politisi PDI Perjuangan itu merasa keberatan jika Pemprov DKI melalui Sarana Jaya dan Jakpro mengenakan sewa jaringan terpadu utilitas. Jika dua BUMD tersebut ngotot dengan menetapkan harga sewa selangit, dikhawatir akan membebani masyarakat Jakarta.

"Apakah ke PAD atau masuk dalam bentuk profit BUMD, ini yang kita perlu ketahui juga. Pada prinsipnya kami mendukung program pembenahan utilitas ini karena masuk ke dalam kegiatan strategis daerah (KSD, Red), tapi kalau ada keberatan seperti ini Komisi B akan turun tangan untuk mencari win-win solu-

tion. Tidak boleh ada yang dirugikan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI," ungkap dia kepada INDOPOS di DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2019).

Menurut dia, tarif sewa tersebut harus ditinjau ulang dan disosialisasikan. Sebab, jika dua BUMD tersebut menetapkan harga sewa yang tinggi, dikhawatirkan akan membebani masyarakat Jakarta ■

"Kami mendorong agar tarif sewa yang mahal tersebut ditinjau ulang dan disosialisasikan kembali. Seharusnya dalam menetapkan sewa dua BUMD pengelola jaringan utilitas tersebut melibatkan pelaku usaha penyedia layanan publik dan penyelenggara telekomunikasi agar didapat angka yang tidak merugikan penyedia dan tidak terlalu murah," imbuh dia.

Pihaknya juga segera memanggil dua BUMD tersebut untuk meminta keterangan. Komisi B mengetahui latar belakang penetapan sewa dan pendapatan hasil sewa jaringan utilitas bawah tanah tersebut akan masuk ke mana.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyampaikan, harga yang terungkap itu barulah dalam acara pertemuan awal (kick off meeting) berkaitan dengan sosialisasi Pergub 106 /2019 yang di dalamnya diamanatkan untuk membuat sistem jaringan utilitas terpadu (SJUT).

"Tentunya dari SJUT, biasanya kabel udara ada di atas itu akan dimasukkan dalam SJUT. Selama ini belum ada namanya tarif pemanfaatan jaringan. Selama ini gratis. Masih ilegal yang di atas itu. Kita tertibkan kita masukkan dan nanti akan kita buat ada tarifnya. Memang izinnya itu kan izin atas pelayanan perizinan, namun selain izin itu ada tarif pemanfaatan jaringan," ujar dia.

Dasar hukumnya, kata Hari, ada di dalam Pergub 106/2019 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas dan Perda 8/1999 tentang jaringan utilitas.

Seperti diketahui, keberatan mengenai tarif sewa diketahui saat sosialisasi dengan para pengusaha anggota Asosiasi Pengusaha Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), operator telekomunikasi non-Apjatel, operator selular, Telkom, PLN, PDAM dan PGN diundang untuk mendapatkan informasi mengenai standar pembuatan Pembuatan Ducting Terpadu Utilitas yang dilakukan Pemprov DKI melalui Badan usaha milik daerah (BUMD) PT Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo.

Antusiasme para pemangku kepentingan tersebut untuk mendukung Pemprov DKI menata ulang jaringan utilitas akhirnya berubah ketika disuguhkan estimasi skema tarif yang dibuat BUMD tersebut. Dalam dokumen yang dikeluarkan Sarana Jaya disebutkan mekanisme bisnis yang akan ditawarkan Sarana Utilitas kepada operator yaitu sekali pembayaran (One Time Charge).

Harga sewa untuk pelaksanaan pembuatan "ducting" terpadu dengan kondisi trotoar telah dilakukan revitalisasi berikut pembuatan "manhole" per 200 meter dengan "end-hole" per 100 meter dipatok Rp700 ribu per meter per operator per satu ruas jalan.

Sedangkan pelaksanaan pembuatan "ducting" terpadu dengan kondisi trotoar belum direvitalisasi berikut pembuatan "manhole" per 200 meter tanpa pembuatan "end-hole" per 100 meter dipatok Rp600 ribu per meter per operator per satu ruas jalan.

Sedangkan PT Jakpro menawarkan harga untuk sewa sarana utilitas kabel per meter per tahun per satu ruas jalan sebesar Rp13.000-Rp17.000 (microduct 10 mm), Rp25.000-Rp35.000 (subduct 20 mm), Rp50.000-Rp70.000 (subduct 40 mm) dan Rp3.000 (subduct akses).

Direktur Eksekutif ICT (Information and Communication Technology) Institute Heru Sutadi mengatakan, harga yang

diberikan Pemprov DKI melalui PT Sarana Jaya dan Jakpro terbilang mahal. Harga sewa untuk pelaksanaan pembuatan ducting terpadu pada trotoar revitalisasi (baru) dengan pembuatan manhole per 200 m dengan end-hole per 100 m dipatok Rp 700 ribu per meter per operator per satu ruas jalan.

Sedangkan pelaksanaan pembuatan ducting terpadu dengan kondisi trotoar belum direvitalisasi dengan pembuatan manhole per 200 m tanpa pembuatan end-hole per 100 m dipatok Rp 600 ribu per meter per operator per satu ruas jalan. Sementara itu Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (anak perusahaan Jakpro) Gunung Kartiko, mengatakan penyebutan angka Rp 70 ribu per meter per tahun tersebut tidak ada dasarnya. "Pada kickoff meeting sosialisasi Pergub 106 dan 110 (dasar hukum pembangunan ducting) yang dilakukan pada Kamis 28 Novenver lalu, kami sampaikan estimasi harga sewa di range Rp13-17 ribu per meter per tahun," ujar Gunung. (aen/dni)



Apakah ke PAD atau masuk dalam bentuk profit BUMD, ini yang kita perlu ketahui juga".

**Pandapotan Sinaga**  
Sekretaris Komisi B DPRD  
DKI Jakarta